

## Delegitimasi Wacana Kekerasan Seksual Komnas Perempuan di Media Sosial oleh Warganet pada Kasus Ferdy Sambo

### *Delegitimation of Komnas Perempuan's Discourse on Sexual Violence in the Ferdy's Sambo Case*

Nur Imroatus Sholikhah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi S3 Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

[nurimroatus@mail.uqm.ac.id](mailto:nurimroatus@mail.uqm.ac.id)

Naskah diterima: 15 November 2022, direvisi: 27 Mei 2023, disetujui: 13 Juli 2023

#### **Abstract**

*This article examines the phenomenon of netizens' negative responses towards the statement by Komnas Perempuan regarding the alleged sexual violence experienced by Ferdy Sambo's wife, as a form of delegitimation. Legitimation is built by discursive practice, and hence can be delegitimated by mechanisms of opposition. Delegitimation is carried out through three components of discursive legitimation, namely: (i) authority, (ii) rationality and (iii) symbolic. As a research method, a case study of citizens' Twitter posts (tweets) from 1-10 September 2022 were analyzed using Intelligent Socio Analytic (ISA), a social media big data extraction tool. The results show in terms of authority, discursive delegitimation is carried out by positioning Komnas Perempuan to be supporting the narrative of the Police. In the aspect of rationality, Komnas Perempuan's discourse is seen as protecting the perpetrators of the murder instead of siding with the victim's families. As for symbolic narratives, Komnas Perempuan is equated with other institutions that can be bribed and are weak in the face of power. In the digital era, discursive delegitimation can strengthen or weaken the digital authority of the public.*

**Keywords:** *Delegitimation, discursive legitimation, sexual violence, big data analytic, Ferdy Sambo.*

#### **Abstrak**

*Artikel ini melihat fenomena "hujatan" warganet atas pernyataan Komnas Perempuan tentang dugaan kekerasan seksual yang dialami istri Ferdy Sambo sebagai bentuk delegitimasi. Legitimasi sebagai praktik diskursif memungkinkan mengalami delegitimasi melalui mekanisme oposisi. Delegitimasi dilakukan melalui tiga komponen pembentuk legitimasi wacana antara lain: (i) aspek otoritas, (ii) rasionalitas dan (iii) simbolik. Metode penelitian adalah studi kasus data postingan warganet di Twitter terkait Komnas Perempuan menggunakan alat ekstraksi big data media sosial Intelligent Socio Analytic (ISA) sepanjang 1-10 September 2022. Hasil penelitian menunjukkan delegitimasi wacana pada dimensi otoritas dilakukan dengan memosisikan Komnas Perempuan mendukung narasi Polisi. Pada dimensi rasionalitas, wacana Komnas Perempuan disebut melindungi pelaku pembunuhan dan tidak berpihak pada keluarga korban. Sementara, pada dimensi simbolik yakni dengan menyebut Komnas Perempuan sama dengan lembaga lain yang lemah menghadapi kekuasaan dan bisa disuap. Di era digital, delegitimasi wacana dapat menjadi bagian dari penguatan maupun pelemahan otoritas digital publik.*

**Kata kunci:** *Delegitimasi, Diskursus Legitimasi, Kekerasan Seksual, Big Data Analytic, Ferdy Sambo*

## PENDAHULUAN

Kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), Irjen Pol Ferdy Sambo, pada 8 Juli 2022 menyita perhatian publik dan menjadi *trending topic* di Twitter hingga beberapa minggu kemudian. Salah satu motif pembunuhan yang muncul sebagai kontroversi adalah pengaduan istri Sambo, PC, kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang mengaku mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan oleh Brigadir J. Pelecehan seksual ini kemudian dijadikan motif oleh Sambo membunuh Brigadir J. Motif ini ditentang oleh warganet dengan mengajukan berbagai argumen, seperti misalnya ketidakmungkinan seorang bawahan setingkat Brigadir melecehkan istri jenderal yang juga atasannya.

Warganet menuding PC melakukan kebohongan dan menjadi bagian dari rencana pembunuhan. Wacana pelecehan seksual PC semakin meluas ketika Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan pernyataan pers pada 1 September 2022 terkait pengaduan kekerasan seksual PC. Komnas Perempuan juga memberikan dukungan kepada polisi atas penangguhan tahanan terhadap istri Ferdy Sambo, PC, sebelum adanya putusan dari pengadilan (Prasetya, 2022). Rekomendasi ini diberikan dengan pertimbangan fungsi *maternity* PC yang masih memiliki anak balita. Pernyataan ini membuat kecewa warganet karena dianggap memberikan perlakuan spesial pada PC selaku bagian dari kasus pembunuhan yang dilakukan Sambo. Paska konferensi pers tersebut Komnas Perempuan menjadi *trending topic* di media sosial yang disebabkan beragam ungkapan kekecewaan, termasuk hujatan kepada Komnas Perempuan yang dilakukan secara masif.

Kemarahan warganet menarik ketika dihadapkan pada Komnas Perempuan sebagai lembaga otoritatif dalam mewacanakan isu perempuan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebagai lembaga otoritatif, data maupun pernyataan Komnas Perempuan terkait kekerasan seksual seringkali menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, maupun pengambil kebijakan (Alfitri, 2020; Noer et al., 2021). Artinya, wacana seputar isu perempuan termasuk kekerasan seksual yang dinarasikan oleh Komnas Perempuan akan menjadi wacana yang *legitimate*.

Sementara itu, dalam kasus Sambo, legitimasi wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan justru ditentang oleh warganet melalui beragam narasi kemarahan. Pernyataan Komnas Perempuan terhadap dugaan kekerasan seksual yang dialami PC, ramai dihujat karena dianggap “melenceng” dari otoritas Komnas Perempuan sebagai lembaga pengawal isu-isu perempuan dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia.

Fenomena keterbukaan warganet menyampaikan hujatan ataupun narasi kekecewaan di era digital menjadi tema riset yang banyak dibahas. Dalam beberapa penelitian, hujatan warganet di media sosial menunjukkan jaringan emosi publik (Chung & Zeng, 2020) maupun sentimen pada isu tertentu (Singh et al., 2020). Hujatan juga menjadi bentuk kritik atas wacana yang ada (Tiidenberg & Whelan, 2019). Pada beberapa kasus, hujatan menjadi representasi gerakan (*movement*) seperti misalnya pada gerakan penolakan kebijakan pemerintah dan *cancel culture* (Bouvier & Machin, 2021; D. Clark, 2020; Velasco, 2021). Hujatan yang secara khusus ditujukan kepada otoritas juga dapat dilihat sebagai upaya delegitimasi melalui wacana (Vaara, 2014).

Delegitimasi wacana, dalam praktiknya merupakan strategi untuk menghadapi dominasi legitimasi wacana yang ada. Foucault menjelaskan bagaimana wacana menjadi dominan dan *legitimate* karena adanya pelibatan kekuasaan dalam bentuk otoritas yang terlembagakan. Tanpa

legitimasi wacana, otoritas lembaga akan terdegradasi. Oleh sebab itu, legitimasi wacana diperoleh melalui praktik diskursif (*discursive legitimation*). Delegitimasi, pada gilirannya mengupayakan legitimasi wacana alternatif yang secara khusus menjadi oposisi dari wacana otoritas (Foucault, 1982).

Di era digital, terdapat perubahan bagaimana legitimasi sebuah wacana dikontestasikan. Bolander dan Locher (2020) menyebut secara khusus wacana yang dibentuk secara digital sebagai wacana digital (*digital discourse*). Hal ini untuk menjelaskan bagaimana individu mengelola dan mengeksploitasi kemampuan untuk membentuk dan mengekspresikan gagasan melalui narasi secara online.

Perkembangan wacana digital melibatkan beberapa pendekatan utama seperti misalnya *Computer-Mediated Discourse* (CMD) (Herring, 2013) dan *mobile communication* (Deumert, 2014). Pendekatan-pendekatan tersebut menjelaskan bagaimana analisis wacana digital tidak sekadar hubungan antara teks dan interpretasinya, tetapi juga aspek struktur bahasa komputasi, kontekstualisasi pemaknaan digital, manajemen interaksi (keberulangan dan keterkaitan), serta pengembangan pola wacana digital itu sendiri (Bolander & Locher, 2020).

Penelitian ini mengajukan rumusan pertanyaan yakni, bagaimana warganet mendelegitimasi wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan di media sosial melalui kasus Ferdy Sambo. Upaya delegitimasi wacana dilakukan dengan membangun narasi online yang mengekspresikan kekecewaan atau hujatan melalui berbagai platform digital seperti media sosial. Artinya, legitimasi Komnas Perempuan membangun wacana digital tentang kekerasan seksual sedang digugat melalui perebutan ruang kuasa wacana digital. Warganet menggunakan kemungkinan narasi dan algoritma platform media sosial menjadi masif dan menyebar. Penyebaran hujatan maupun narasi yang terbaca “menyerang” dan “anarkis” bisa dilihat sebagai upaya mendegradasi dominasi maupun eksploitasi wacana yang diproduksi negara atau individu dengan kuasa kelas sosial (Motion, 2005).

Dalam konteks masyarakat demokrasi, hujatan warganet dapat diletakkan sebagai opini publik yang diakui kekuatannya dalam sistem negara bangsa. Opini publik juga memiliki kekuatan ketika dikaitkan dengan konteks politik dan kebijakan. Misalnya saja bagaimana hujatan dan pujian digunakan sebagai pola mendulang elektabilitas politisi. Dengan kekuatan ini, warganet memiliki peluang melakukan delegitimasi wacana.

Hujatan warganet pada wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan juga dapat dilihat sebagai upaya delegitimasi melalui wacana. Sebagai sebuah wacana, kekerasan seksual dibahas dalam berbagai kajian terutama dalam pendekatan feminisme. Kajian feminisme melihat wacana sebagai potensi perlawanan pada narasi-narasi dominan yang menjadi legitimasi tindakan kekerasan seksual (Almansori & Stanley, 2022; Gunnarsson, 2018). Artinya, upaya diskursif yang dibangun warganet sebagai upaya delegitimasi akan mempertimbangkan spirit wacana kekerasan seksual yang dibawa oleh gerakan feminisme.

Artikel ini tertarik untuk menjelaskan bagaimana diskursus legitimasi dibangun oleh warganet sebagai upaya delegitimasi wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan pada kasus Ferdy Sambo. Secara khusus, artikel ini akan mengonstruksi narasi-narasi yang dikembangkan warganet sebagai upaya delegitimasi wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan. Konstruksi narasi ini akan memberikan gambaran tentang pengetahuan warganet pada dimensi wacana kekerasan seksual itu sendiri.

Diskursif legitimasi setidaknya mengasumsikan adanya tiga dimensi wacana, antara lain: otoritas (*authority*), validitas (*validity*), dan finalitas (*finality*) (Glozer et al., 2019). Dimensi otoritas secara khusus merujuk pada asumsi hirarki dan pilihan kuasa (Haugaard, 2018) atas terbentuknya

wacana yang ada (Van Leeuwen, 2007). Otoritas menempel pada organisasi atau aktor-aktor dengan status sosial lebih tinggi atau memiliki kuasa dalam suatu wacana. Otoritas dalam komunikasi publik digital juga dikaitkan dengan kemampuan aktor terhubung dengan pengguna media sosial lainnya. Hal ini ditandai dengan pendapatnya banyak disebut dalam suatu wacana (Casero-Ripollés, 2020). Dalam kasus ini, hujatan warganet membangun narasi mempertanyakan legitimasi Komnas Perempuan sebagai lembaga yang dianggap otoritatif dalam isu-isu HAM.

Dimensi validitas diajukan untuk melihat konstruksi wacana dari aspek rasionalitas atau penekanan pada penilaian etis (Björkqvall & Höög, 2019; Van Leeuwen, 2007). Validitas umumnya dikaitkan dari sejauh mana wacana dapat diukur sebagai sesuatu yang mampu mempengaruhi tindakan. Oleh sebab itu, konstruksi validitas wacana dilakukan dengan melihat bagaimana unsur-unsur dalam argumentasi dibangun (Jaipal-Jamani, 2014; St-Onge et al., 2017). Dalam penelitian ini, hujatan warganet berisi argumen-argumen yang dapat dinilai sebagai pembatalan pada dimensi validitas dari legitimasi wacana Komnas Perempuan dan Komnas HAM pada kasus Sambo.

Sementara, dimensi finalitas mengonstruksi narasi yang secara simbolis digunakan untuk mengunci narasi pada penegasan posisi, baik kontra maupun setuju (Glozer et al., 2019). Bahkan, narasi ini dalam konstruksi legitimasi wacana yang berpotensi membuat maupun melanggengkan mitos dalam wacana (Van Leeuwen, 2007).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pembicaraan warganet tentang Komnas Perempuan dalam kasus Sambo. Studi kasus dipilih terutama untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana sebuah fenomena tertentu dapat terjadi (Yin, 2018). Penelitian ini bermaksud menjelaskan bagaimana delegitimasi wacana dilakukan warganet melalui narasi kekecewaan ataupun hujatan yang ditujukan pada Komnas Perempuan sebagai lembaga otoritatif terkait perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan.

Metode studi kasus juga memungkinkan untuk melihat hubungan antara teknologi media sosial tertentu dan praktik pengguna menghasilkan dinamika dan orientasi temporal tertentu (Poell, 2019). Dalam hal ini, upaya delegitimasi warganet terhadap wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan menjadi ekspresi di media sosial hanya terkait kasus Sambo dan pada kurun waktu tertentu.

Data percakapan warganet diambil dari *platform* media sosial Twitter. Sejak kasus Sambo menjadi konsumsi publik di media sosial maupun media massa pada 8 Juli 2022, kasus ini cukup lama bertahan sebagai *trending topic* di Twitter. Hingga saat pernyataan pers Komnas Perempuan pada 1 September 2022, kasus ini masih menjadi *trending topic*.

Rentang waktu pengambilan data dilakukan sepanjang 1-10 September 2022. Pengambilan rentang waktu sepanjang sepuluh hari setelah pernyataan pers untuk melihat percakapan utama warganet merespons pernyataan pers tersebut. Twitter digunakan dalam penelitian karena sering dikaitkan dengan isu-isu publik dan bagian dari gerakan sosial khususnya isu-isu perempuan (Li et al., 2021; Syamili & Rekha, 2021).

Pengambilan data percakapan warganet di Twitter menggunakan mesin ekstraksi teks media sosial ISA (*Intelligent Socio Analytic*) yang bekerja menggunakan metode *Natural Language Processing* (NLP). Metode NLP menjadi bagian dari *big data analytic* terutama untuk menyajikan analisis teks dan visualisasinya (Katre, 2019). Secara kualitatif, mesin membuat algoritma

kategorisasi teks berdasarkan kesamaan kata, periode postingan, serta pengelompokan akun berdasarkan teks postingan. Pengkategorian teks tersebut dalam jumlah terbatas umumnya dilakukan oleh peneliti kualitatif menggunakan CAQDAS (*Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software*) seperti misalnya: Atlas.ti, NVivo, dan MaxQda (Franzosi, 2021).

Dari hasil ekstraksi, terdapat 152.232 percakapan yang muncul dengan kata kunci “sambo” AND “komnas perempuan”. Untuk menghindari “bias” data disebabkan kemungkinan konten yang tidak relevan atau hanya memanfaatkan kata yang sedang trending topik untuk kepentingan iklan dan lain sebagainya, maka dalam pembuatan kata kunci disertai dengan perintah “NOT” (*text excluded*). Selanjutnya, dari data percakapan tersebut akan dipilih 10 narasi postingan yang dominan mendapatkan respons warganet (*most engagement post and account*). Identifikasi semacam ini dalam pendekatan kualitatif merupakan bagian dari strategi akses pemerolehan data yang jumlahnya besar secara cepat meskipun perlu mempertimbangkan bias yang diakibatkan risiko media digital (Mills, 2018).

Data yang telah terekstraksi akan dianalisis menggunakan analisis isi. Postingan dominan yang telah diekstraksi akan dianalisis berdasarkan kategori otoritas, rasionalitas, dan simbolik. Postingan berisi delegitimasi otoritas menunjukkan kritikan yang fokus pada eksistensi atau posisi otoritatif Komnas Perempuan. Postingan berisi delegitimasi rasionalitas menunjukkan kritikan berupa argumentasi atau alasan kekecewaan warganet. Sementara postingan berisi delegitimasi simbolik menunjukkan narasi yang tidak secara langsung terhubung tetapi dihubungkan untuk memberikan efek simbolik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

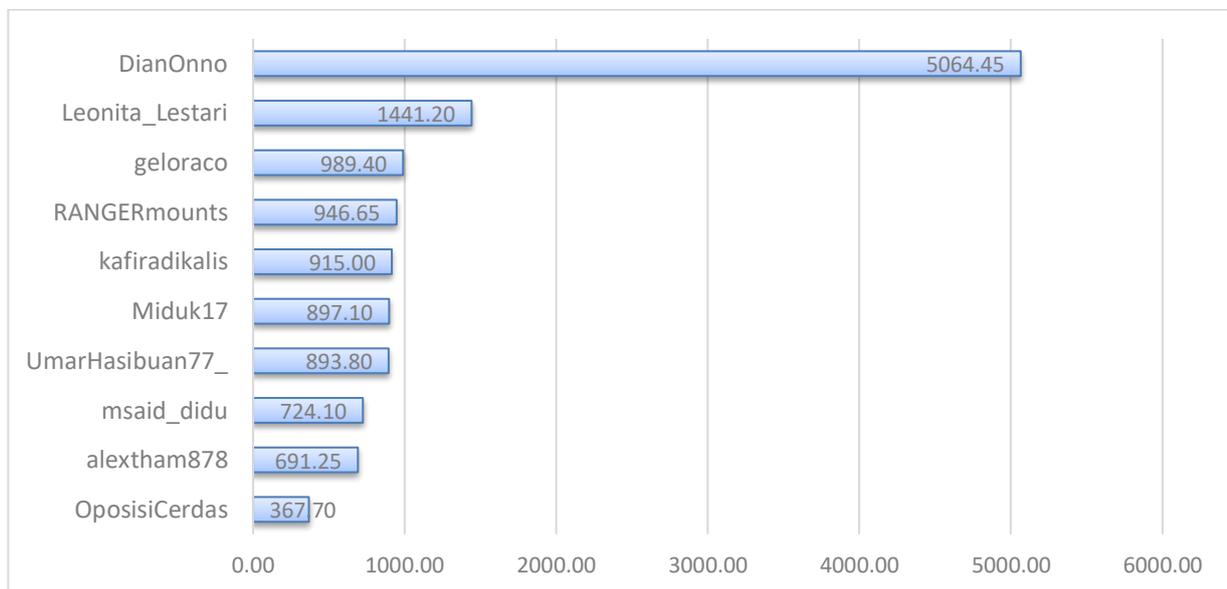
Dalam kasus Ferdy Sambo, kekecewaan maupun hujatan yang ditujukan kepada Komnas Perempuan diungkapkan dengan berbagai narasi kekecewaan. Dalam Gambar 1 terlihat sejumlah kata yang paling banyak digunakan selain “Komnas Perempuan” adalah “Komnas HAM”. Warganet menyebut Komnas Perempuan sama mengecewakannya dengan Komnas HAM. Dalam beberapa postingan maupun komentar menyebut kedua lembaga HAM tersebut telah diintervensi oleh kepentingan penguasa yang dilancarkan melalui skenario Ferdy Sambo.

Kasus pembunuhan Brigadir J dalam skenario Sambo dikaitkan dengan motif pembunuhan. Sambo bersikeras bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukannya merupakan respons spontan karena marah mendengar pengakuan istrinya, PC, yang mengalami pelecehan seksual oleh ajudannya sendiri, yakni Brigadir J. Sementara warganet meyakini bahwa motif pelecehan seksual digunakan untuk menutupi motif yang lebih besar yakni Brigadir J dianggap ancaman karena mengetahui kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Ferdi Sambo. Oleh sebab itu, pernyataan Komnas Perempuan yang secara khusus menceritakan peristiwa kekerasan seksual berdasarkan pengaduan dari PC, dianggap ikut dalam skenario Sambo.



Gambar 1. Ragam Kata yang Menyertai Narasi Warganet Pada Topik Komnas Perempuan

Warganet juga menyatakan heran dengan sikap Komnas Perempuan dalam kasus ini. “*never thought*” menjadi salah satu kata yang juga banyak di retweet. Kalimat lengkap dari kalimat ini yaitu “*Never thought I’d see the day when Komnas Perempuan dan Komnas HAM berada dalam satu kategori kelompok yang sama dengan Polisi*”, dari tweet yang diposting @DianOnno. Postingan akun tersebut bahkan menjadi yang paling tinggi *engagement*-nya (Gambar 2).



Gambar 2. Akun Twitter dengan *Engagement* Tertinggi pada Topik Komnas Perempuan Sepanjang 1-10 September 2022

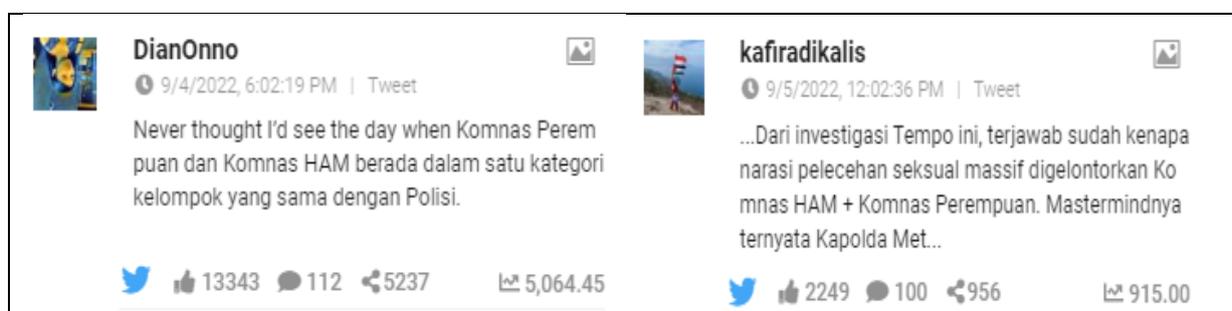
Tingginya *engagement* dalam konteks media sosial menunjukkan adanya hubungan antara wacana yang dibangun melalui substansi postingan dengan kepentingan publik warganet (Ye et al., 2017). Hubungan ini bisa berupa impresi negatif, netral, maupun positif terkait isu yang sedang

diwacanakan oleh akun tersebut. Oleh sebab itu, akun-akun media sosial dengan *engagement* tinggi ditandai dengan intensitas aktivitas membangun opini, populer sebagai aktor-aktor pembentuk wacana, dan berpotensi membentuk kekuatan otoritas digital (Casero-Ripollés, 2020).

### Delegitimasi Otoritas

Sebagai sebuah wacana, isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki kemungkinan ditarik dalam beragam kepentingan atas nama publik (Manokha, 2009). Peran lembaga otoritatif lembaga HAM sering dikaitkan dengan kuasa menempatkan kepentingan publik tertentu dalam wacana HAM. Meskipun dalam praktiknya, wacana otoritatif lembaga HAM tidak selalu mutlak didukung oleh publik. Pada beberapa kasus, publik “mencurigai” wacana HAM diintervensi oleh kepentingan global misalnya mekanisme pendanaan lembaga HAM yang melibatkan donor internasional (Ron et al., 2016).

Tabel 1. Narasi Delegitimasi Otoritas Wacana Kekerasan Seksual Komnas Perempuan



Pada tabel 1, postingan @DianOnno, “*Never thought I’d see the day when Komnas Perempuan dan Komnas HAM berada dalam satu kategori kelompok yang sama dengan Polisi*”, menjadi narasi delegitimasi otoritatif paling banyak didukung warganet. Postingan tersebut mendapat like sebanyak 13.343 kali dan di-retweet sebanyak 5.237 kali. Postingan ini pada dasarnya merupakan ekspresi keheranan karena Komnas Perempuan selama ini menjadi lembaga yang justru sering mengkritik proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian.

Legitimasi otoritatif yang dimiliki Komnas Perempuan secara khusus sebagai Lembaga yang memiliki sumberdaya ahli (*authority of expertise*) dalam kaitan dengan HAM dan isu-isu perempuan (Rivers & Ross, 2020). Otoritas keahlian ini sekaligus merupakan *legitimation of power* (Van Leeuwen, 2007) sehingga dapat digunakan untuk menghadapi otoritas dan kekuatan dari lembaga atau kekuasaan lainnya (Haugaard, 2018; Rivers & Ross, 2020) termasuk kepolisian. Akan tetapi, dalam kasus Sambo warganet melihat wacana yang dibangun Komnas Perempuan dianggap “satu kelompok” dengan polisi yang sedang bermasalah.

Kehadiran Komnas Perempuan dalam kasus ini disayangkan karena justru terkesan melindungi Ferdy Sambo dan PC dari jeratan hukuman maksimal. Bahkan warganet menyebut bahwa wacana kekerasan seksual justru “dibesarkan” oleh kepolisian. Dalam kasus Sambo, Komnas Perempuan “dilemahkan” otoritasnya dengan memposisikan satu kelompok dengan polisi dan mudah terpengaruh dengan skenario yang disiapkan polisi. Padahal dalam kasus Sambo, institusi kepolisian tengah menjadi sorotan publik disebabkan melalui kasus Sambo bagaimana praktek penyalahgunaan wewenang sebagai sesuatu yang lazim. Sambo sebagai Kadiv

Propam atau kepala “polisinya polisi” saja bisa melakukan pembunuhan kepada anak buahnya dan mengatur upaya menutupi kejahatan dengan melibatkan puluhan polisi aktif.

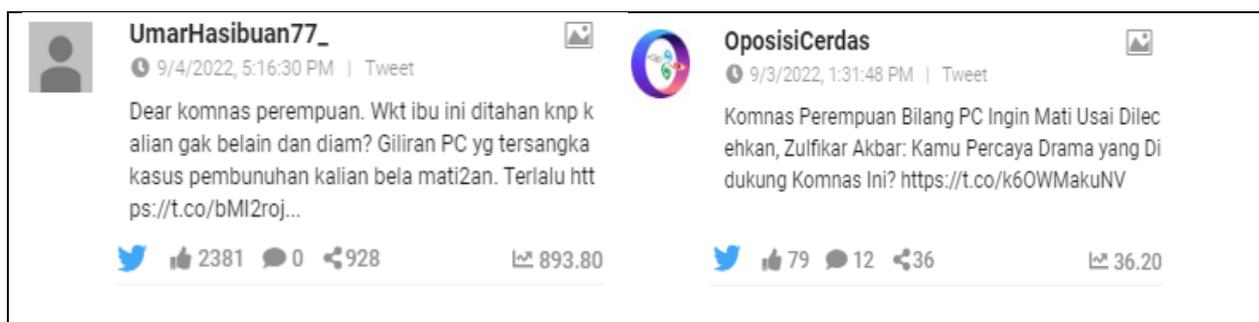
### Delegitimasi Rasionalitas

Delegitimasi dalam dimensi rasionalitas umumnya dilakukan dengan mempermasalahkan moralitas, baik berupa tindakan, keputusan, pernyataan, dan sebagainya (Budd et al., 2019). Praktik delegitimasi semacam ini menjadi bagian dari legitimasi evaluasi moral (*moral evaluation legitimation*) yang dalam wacana dibangun dengan cara mempermasalahkan nilai moral yang sifatnya abstrak, seperti misalnya menghadapkan kata “baik” dan “buruk” (Van Leeuwen, 2007). Pengembangan apa yang disebut “baik” dan “buruk” dibangun berdasarkan nilai-nilai moral yang telah menjadi bagian pemahaman masyarakat.

Bagaimana wacana dapat terhubung dengan persoalan moral, perlu dilakukan konstruksi narasi yang ada di sekitar upaya mempermasalahkan moralitas tersebut. Konstruksi narasi ini akan menunjukkan akumulasi narasi yang menguatkan adanya wacana moralitas. Narasi untuk membangun wacana moralitas dilakukan melalui peran-peran kebahasaan yang menjadi pemahaman sosial. Dalam beberapa kajian, wacana moralitas dapat dibangun melalui mistifikasi (Yağcıoğlu & Cem-Değer, 2001; Yu, 2022), metafora (Budd et al., 2019), maupun analogi dan perbandingan moral (Glozer et al., 2019).

Di era digital, delegitimasi melalui diskursus moral cukup intensif digunakan sebagai mekanisme validasi atas legitimasi rasional sebuah wacana. Dalam wacana kekerasan seksual maupun isu-isu perempuan umumnya, rasionalisasi dilakukan misalnya dengan mengajukan prasangka moral untuk menguatkan asumsi seksisme (Sunderland, 2020). Salah satu contohnya, ketika Komnas Perempuan mendorong wacana pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) juga menghadapi upaya delegitimasi dari kelompok agama yang digerakkan oleh anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai RUU mendukung zina dan perilaku homoseksual (Miichi, 2020).

Tabel 2. Narasi Delegitimasi Rasionalitas Wacana Kekerasan Seksual Komnas Perempuan



Delegitimasi rasional dalam penelitian ini ditunjukkan warganet dengan membuat validasi moral *maternity* dan keberpihakan pada keluarga korban (Tabel 2). Warganet membuat analogi rekomendasi penangguhan penahanan PC oleh Komnas Perempuan dengan perempuan lain yang juga memiliki anak balita tetapi tetap ditahan. Meskipun Komnas perempuan dalam siaran pers yang sama juga memberikan penekanan bahwa Kapolri juga harus memperlakukan hal yang sama kepada perempuan lain yang menghadapi situasi yang sama dengan PC. Akan tetapi, pernyataan

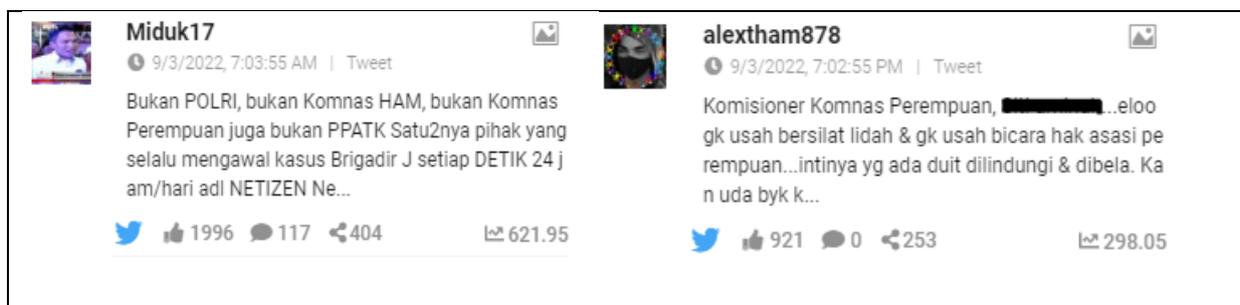
itu dianggap tidak sebanding dengan “kegigihan” yang diberikan Komnas Perempuan dalam konteks PC. Hal ini menjadi argumentasi untuk membuat prasangka bahwa Komnas Perempuan tidak konsisten dan cenderung berpihak pada pelaku pembunuhan. Selain itu, warganet juga memvalidasi prasangka dengan membuat rasionalisasi bahwa keberpihakan Komnas Perempuan kepada pelaku karena mempercayai skenario drama kekerasan seksual.

### Delegitimasi Simbolik

Delegitimasi otoritas yang dibangun melalui delegitimasi rasional dengan validasi moral, pada gilirannya membutuhkan delegitimasi wacana pada dimensi finalitas. Dalam diskursus legitimasi, dimensi finalitas ini bekerja dengan memitoskan legitimasi otoritas dan rasional melalui nilai-nilai simbolik. Artinya, legitimasi wacana sebuah organisasi dikonstruksi melalui pemitosan otoritas melalui hubungannya dengan mitos atas nilai-nilai simbolis organisasi (Glozer et al., 2019).

Itulah mengapa dalam konteks delegitimasi, kontestasi interpretasi simbolik berfungsi sebagai elemen penting dari politik simbolik, yakni kemampuan simbol dalam memproduksi makna dalam diskursus (Riabov, 2020). Simbol efektif justru karena sifatnya yang ambigu, tidak tepat, dan subjektif karena digunakan sebagai alat inklusi dan eksklusi (Riabov, 2020). Dalam penelitian ini, delegitimasi simbolik dilakukan oleh warganet dengan mengeksklusi wacana Komnas Perempuan dalam kasus Sambo sebagai wacana yang *legitimate*.

Tabel 3. Narasi Delegitimasi Rasionalitas Wacana Kekerasan Seksual Komnas Perempuan



Pada tabel 3 terlihat narasi delegitimasi simbolik yang diajukan warganet yakni dengan menyebut bahwa hanya warganet yang paling setia mengawal kasus dengan keberpihakan yang jelas pada korban Brigadir J dan keluarganya. Lembaga-lembaga lain seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, kepolisian, DPR, LPSK, dan sebagainya yang turut memberikan pernyataan terkait kasus ini, dianggap hanya “membuat gaduh”. Bahkan, untuk menguatkan narasi simbolik ini, warganet mengajukan delegitimasi simbolik dengan menyebut Komnas Perempuan sudah dibayar atau disuap oleh Sambo. Delegitimasi simbolik melalui wacana suap ini menjadi konstruksi finalitas dari delegitimasi otoritas dan rasional yang sebelumnya dibangun melalui wacana “berpihak pada pelaku”, “tidak adil”, dan “mengikuti skenario polisi”.

Konstruksi ketiga bagian delegitimasi wacana Komnas Perempuan dalam kasus Sambo ini berjalan bersamaan dan bukan sebagai sebuah tahapan proses. Delegitimasi rasional dalam praktiknya dibangun melalui pertimbangan diskursus delegitimasi otoritas dan finalitasnya, demikian juga sebaliknya. Dengan kata lain, delegitimasi melalui wacana perlu memperhatikan

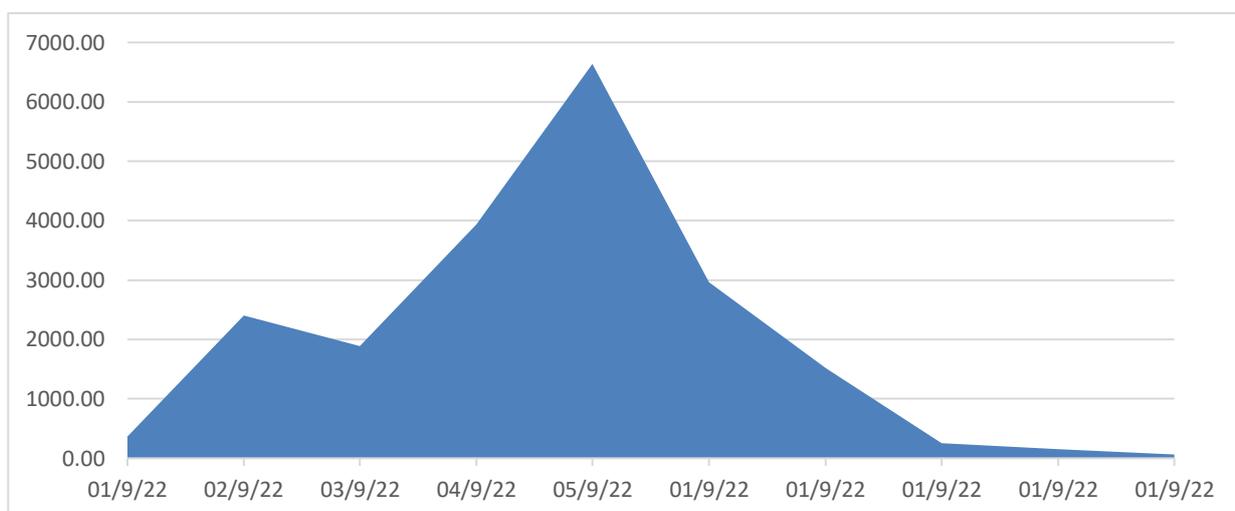
komposisi aktor penggerak wacana dan narasi yang sedang dibangun. Di era digital, peran-peran aktor banyak dimainkan oleh para influencer media sosial.

### Delegitimasi dan Penguatan/Pelemahan Otoritas Publik Digital

Era digital dalam konteks masyarakat demokratis membuka peluang keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat dibanding era-era sebelumnya. Masyarakat digital atau warganet bergerak dengan pola-pola interaksi “baru” dan menghasilkan bentuk-bentuk kekuatan “baru” (Duncombe, 2019; Freelon et al., 2018). Dalam banyak kasus, wacana yang terbangun dari interaksi warganet mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis. Bahkan, politik hari ini sangat mempertimbangkan potensi era digital dalam pembentukan opini maupun upaya peningkatan elektabilitas (Kruse et al., 2018). Delegitimasi wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan pada kasus Sambo juga dimungkinkan dengan adanya media digital seperti media sosial.

Masifnya respons warganet pada kasus Sambo membuat pemerintah dan elit politik sulit mengabaikannya. Sepanjang 1-10 September 2022, pembicaraan warganet di Twitter pada topik Komnas Perempuan terkait kasus Sambo menggunakan mesin ISA tercatat sebanyak 20.193 percakapan (Gambar 3). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD turut merespons kasus ini dengan menyatakan keheranan kepada Komnas Perempuan karena bisa “mempercayai” pengakuan PC (Sadat & Ilham, 2022). Konsekuensinya, diskursus kekerasan seksual menjadi lebih intens dalam kasus ini dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Banyak aktor dan “kepentingan” ikut memainkan peran dalam mengonstruksi delegitimasi wacana kekerasan seksual dalam kasus Sambo.

Pada tanggal 5 September 2022 merupakan puncak percakapan yakni sebanyak 6.639 percakapan (Gambar 3). Peningkatan percakapan sepanjang lima hari pertama disebabkan pada saat bersamaan Komnas HAM juga melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa kasus kematian Brigadir J tidak masuk dalam kasus pelanggaran HAM berat (Kurniawan, 2022). Sementara, Komnas Perempuan merekomendasikan penangguhan penahanan PC dengan argumen *maternity* karena PC memiliki anak balita.



Gambar 3. Fluktuasi Jumlah Percakapan di Twitter pada Topik Komnas Perempuan

Besarnya reaksi warganet pada Komnas HAM dan Komnas Perempuan disebabkan legitimasinya sebagai pengawal isu-isu HAM. Artinya, wacana delegitimasi kepada keduanya dalam kasus Sambo dilakukan warganet sebagai upaya “menjaga” legitimasi keduanya. Upaya ini dilakukan dengan meletakkan legitimasi lembaga HAM sebagai sesuatu yang diskursif untuk memastikan bahwa persoalan HAM dan keadilan bagi perempuan memiliki ideologi yang berpihak pada publik dan bukan pada kekuasaan. Dengan kata lain, wacana delegitimasi memiliki fungsi politik dan ideologis dengan melibatkan sosio-kognitif publik dan dilakukan oleh aktor-aktor digital. Mereka membangun narasi dalam wacana dengan berusaha untuk membenarkan, menjelaskan, ataupun mendiskreditkan aktor dan tindakan sosial tertentu dengan validasi rasional berdasarkan kesesuaian dengan sistem hukum, menerima norma atau tatanan sosial atau moral (Amer, 2009).

Meskipun demikian, delegitimasi hanya dimungkinkan ketika narasi warganet dapat berkembang menjadi wacana yang berpengaruh. Indikator keterpengaruhan dapat dilihat dari sejauh mana lembaga ataupun individu yang sedang dikonfrontasi merespons dengan memperkecil gap wacana, misalnya dengan mengklarifikasi, mengubah narasi, meminta maaf, ataupun memberikan alternatif-alternatif narasi sebagai bahan perbandingan. Dalam kasus Sambo, reaksi keras warganet pada wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan direspons dengan upaya Komnas Perempuan membuat alternatif narasi perbandingan seperti misalnya merekomendasikan Polri untuk melakukan penanggulangan penahanan pada perempuan lain yang memiliki kasus dan situasi *maternity* yang sama dengan PC.

Identifikasi keterpengaruhan wacana delegitimasi warganet melalui media digital merupakan fenomena multidimensi yang membutuhkan berbagai komponen pendukungnya. Setidaknya terdapat tiga komponen indikator keterpengaruhan di era digital, antara lain: popularitas, aktivitas, dan otoritas (Casero-Ripollés, 2021). Pertama, popularitas merupakan indikator bahwa aktor digital ataupun akun media sosial cukup dikenal oleh pengguna media sosial lainnya. Popularitas sering dilihat sebagai potensi besar mendatangkan banyak audiens dan memungkinkan membawa pengaruh seperti misalnya narasi postingannya menjadi trending topik di media sosial. Akan tetapi, popularitas tidak selalu dibarengi dengan kepercayaan. Sejumlah akun yang tidak terlalu populer justru lebih dipercaya dalam isu-isu “serius” seperti isu lingkungan (Pittman & Abell, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa popularitas tidak hanya dikaitkan dengan aspek visibilitas, tetapi juga bagaimana narasi konten terhubung dengan isu-isu publik dan kekuasaan (Hutchinson, 2021).

Kedua, aktivitas aktor digital erat kaitannya dengan frekuensi dan konsistensi narasi yang dibangun oleh aktor digital dijadikan rujukan percakapan oleh warganet dalam isu-isu tertentu. Akan tetapi, keaktifan aktor di media sosial juga ditandai dengan kemampuannya membuat konten yang “mewakili” narasi ataupun agenda publik (Casero-Ripollés, 2021). Aktivitas akun dianggap berpengaruh secara kuantitatif dapat dilihat dari pembentukan *engagement* dalam setiap narasinya.

Pembentukan *engagement* di era digital berbeda dengan lingkungan non digital karena sangat mengandalkan peran *platform* media sosial. Di media sosial, narasi ataupun wacana-wacana tentang “perlawanan” ataupun kritik sosial tidak selalu dilakukan oleh aktor yang secara formal terafiliasi pada ideologi “kanan” atau “kiri”. Media sosial kontemporer memfasilitasi semua latar belakang maupun afiliasi aktor melalui pola keterlibatan pada retorika jangka pendek, emosional, dan seringkali individual (Gustafsson & Weinryb, 2020). Kemampuan aktivitas akun aktor membangun *engagement* secara konsisten inilah yang membuatnya disebut sebagai *influencer*.

Ketiga, otoritas digital aktor digital ditunjukkan dengan banyaknya akun yang mereferensikan narasi postingannya. Narasinya bahkan menjadi salah satu penggerak wacana karena mampu menghimpun kesamaan narasi publik (Chinnasamy & Tahrir, 2019). Otoritas digital akan menyeleksi influencer yang dapat diidentifikasi sebagai pengguna akun media sosial yang dikenali memberikan informasi yang baik, dihormati, memiliki otoritas dalam komunitas, dan narasinya menjadi referensi banyak influencer.

Meskipun demikian, pembentukan delegitimasi wacana menggunakan otoritas publik digital masih menggantungkan pada kuasa dan aturan main *platform* media sosial. Setiap media sosial memiliki algoritma dan aturan main yang berbeda-beda sehingga upaya-upaya delegitimasi wacana publik secara digital tidak dapat berlaku sama di setiap *platform*. Sementara itu, pertumbuhan dan perkembangan teknologi media digital semakin cepat dan berubah-ubah. Hal ini berdampak pada keterpengaruhannya upaya delegitimasi wacana berlaku untuk waktu yang relatif cepat.

## KESIMPULAN

Di era digital, kemungkinan publik melakukan delegitimasi wacana lembaga otoritatif semakin terbuka. Dalam konteks masyarakat demokrasi hal ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya keterbukaan dan kebebasan berpendapat terutama untuk memperkuat kualitas interaksi dan kehidupan sosial. Delegitimasi wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan dalam kasus Sambo yang dilakukan warganet menunjukkan bahwa legitimasi lembaga otoritatif diperoleh melalui kontestasi wacana. Di era digital, arena kontestasi wacana kekerasan seksual semakin terbuka dan memungkinkan keterlibatan banyak aktor dengan narasi-narasi alternatif mengenai kekerasan seksual.

Penelitian ini menunjukkan bahwa delegitimasi wacana lembaga-lembaga otoritatif dapat dilakukan dengan mengonstruksi delegitimasi otoritas, rasional, dan simbolik melalui narasi percakapan di media sosial. Delegitimasi otoritas dikonstruksi melalui narasi mereposisi, mendegradasi peran ataupun pengasosiasian secara negatif dengan lembaga lain. Sementara itu, delegitimasi rasional melalui media sosial relatif “membatasi” pola-pola konstruksi narasi sebatas pada evaluasi moral sebagai bentuk validasinya. Adapun, delegitimasi simbolik sebagai finalitas dikonstruksi melalui simbol-simbol komparatif dengan maksud untuk mengeksklusi dari kelompok dan posisi sebelumnya.

Delegitimasi wacana dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya potensi penguatan pembentukan otoritas publik digital melalui identifikasi popularitas, aktivitas, dan otoritas aktor yang terlibat. Meskipun demikian, potensi ini rentan mengalami “pelemahan” disebabkan ekosistem digital yang banyak bergantung pada algoritma dan “aturan main” *platform* yang berbeda-beda. Potensi penguatan dan pelemahan ini penting untuk dikaji lebih lanjut dalam upaya membuka peluang publik digital mengonstruksi wacana-wacana oposisi.

Penelitian ini sekaligus menunjukkan adanya kekhususan dalam mengembangkan pendekatan dan analisa delegitimasi wacana dalam konteks digital (*digital discourse delegitimation*). Delegitimasi wacana secara digital membentuk dimensi otoritas melalui pengulangan teks dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan identifikasi struktur dan interpretasi teks yang mengkombinasikan antara sosiolinguistik dan NLP. Dominasi argumentasi moralitas dalam upaya delegitimasi rasionalitas menunjukkan adanya hegemoni narasi digital

melalui mekanisme referensi postingan influencer. Pengembangan analisa delegitimasi wacana digital perlu mengembangkan NLP dengan kategori teks secara kualitatif dan non/minim referensial. Selanjutnya, delegitimasi wacana digital secara simbolik perlu mengembangkan analisa hubungan teks, platform, algoritma lokasi, maupun periode pembentukan simbolik teks untuk menunjukkan intensitas narasi simbolik berdasarkan platform maupun mobilitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pengajar program doktoral Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang telah terlibat dalam diskusi pengembangan tema penulisan. Ucapan terima kasih secara khusus untuk Nyarwi Ahmad, Ph.D, Lidwina Mutia Sadasri, SIP, MA, Prof. Dr. Phil Hermin Indah Wahyuni, S.IP, M.Si, Dr. Rahayu, S.IP, M.A yang mendampingi proses-proses penulisan akademik penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2020). Protecting Women from Domestic Violence: Islam, Family Law, and the State in Indonesia. In *Studia Islamika* (Vol. A27, Issue 2). <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.9408>
- Almansori, S., & Stanley, M. (2022). Public pedagogy on sexual violence: A feminist discourse analysis of YouTube vlogs after #MeToo. *Journal of Curriculum and Pedagogy*, 19(3). <https://doi.org/10.1080/15505170.2021.1895382>
- Amer, M. M. (2009). "Telling-it-like-it-is": The delegitimation of the second Palestinian Intifada in Thomas Friedman's discourse. *Discourse and Society*, 20(1). <https://doi.org/10.1177/0957926508097093>
- Björkqvall, A., & Höög, C. N. (2019). Legitimation of value practices, value texts, and core values at public authorities. *Discourse and Communication*, 13(4), 398–414. <https://doi.org/10.1177/1750481319842457>
- Bolander, B., & Locher, M. A. (2020). Beyond the online offline distinction: Entry points to digital discourse. *Discourse, Context and Media*, 35. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2020.100383>
- Bouvier, G., & Machin, D. (2021). What gets lost in Twitter 'cancel culture' hashtags? Calling out racists reveals some limitations of social justice campaigns. *Discourse and Society*, 32(3). <https://doi.org/10.1177/0957926520977215>
- Budd, K., Kelsey, D., Mueller, F., & Whittle, A. (2019). Metaphor, morality and legitimacy: A critical discourse analysis of the media framing of the payday loan industry. *Organization*, 26(6). <https://doi.org/10.1177/1350508418812569>
- Casero-Ripollés, A. (2020). Influence of media on the political conversation on Twitter: Activity, popularity, and authority in the digital debate in Spain. In *Icono14* (Vol. 18, Issue 1). <https://doi.org/10.7195/RI14.V18I1.1527>
- Casero-Ripollés, A. (2021). Influencers in the political conversation on twitter: Identifying digital authority with big data. *Sustainability (Switzerland)*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/su13052851>
- Chinnasamy, S., & Tahrim, A. M. (2019). New media and social influencer engagement on lifestyle and political content. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(3). <https://doi.org/10.35940/ijrte.C5274.098319>
- Chung, W., & Zeng, D. (2020). Dissecting emotion and user influence in social media communities: An interaction modeling approach. *Information and Management*, 57(1). <https://doi.org/10.1016/j.im.2018.09.008>
- D. Clark, M. (2020). DRAG THEM: A brief etymology of so-called "cancel culture." *Communication and the Public*, 5(3–4). <https://doi.org/10.1177/2057047320961562>

- Deumert, A. (2014). Sociolinguistics and mobile communication. In *Sociolinguistics and Mobile Communication*. <https://doi.org/10.1177/1461444816656341a>
- Duncombe, C. (2019). The Politics of Twitter: Emotions and the Power of Social Media. *International Political Sociology*, 13(4). <https://doi.org/10.1093/ips/olz013>
- Foucault, M. (1982). The Subject and Power. *Critical Inquiry*, 8(4). <https://doi.org/10.1086/448181>
- Franzosi, R. (2021). What's in a text? Bridging the gap between quality and quantity in the digital era. *Quality and Quantity*, 55(4). <https://doi.org/10.1007/s11135-020-01067-6>
- Freelon, D., McIlwain, C., & Clark, M. (2018). Quantifying the power and consequences of social media protest. *New Media and Society*, 20(3). <https://doi.org/10.1177/1461444816676646>
- Glozer, S., Caruana, R., & Hibbert, S. A. (2019). The Never-Ending Story: Discursive Legitimation in Social Media Dialogue. *Organization Studies*, 40(5). <https://doi.org/10.1177/0170840617751006>
- Gunnarsson, L. (2018). "Excuse Me, But Are You Raping Me Now?" Discourse and Experience in (the Grey Areas of) Sexual Violence. *NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research*, 26(1). <https://doi.org/10.1080/08038740.2017.1395359>
- Gustafsson, N., & Weinryb, N. (2020). The populist allure of social media activism: Individualized charismatic authority. *Organization*, 27(3). <https://doi.org/10.1177/1350508419828565>
- Haugaard, M. (2018). What is authority? *Journal of Classical Sociology*, 18(2). <https://doi.org/10.1177/1468795X17723737>
- Herring, S. C. (2013). Discourse in web 2.0: Familiar, reconfigured, and emergent. In *Discourse 2.0: Language and New Media*.
- Hutchinson, J. (2021). Micro-platformization for digital activism on social media. *Information Communication and Society*, 24(1). <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1629612>
- Jaipal-Jamani, K. (2014). Assessing the validity of discourse analysis: transdisciplinary convergence. *Cultural Studies of Science Education*, 9(4). <https://doi.org/10.1007/s11422-013-9567-7>
- Katre, P. D. (2019). NLP based text analytics and visualization of political speeches. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(3). <https://doi.org/10.35940/ijrte.C6503.098319>
- Kruse, L. M., Norris, D. R., & Flinchum, J. R. (2018). Social media as a public sphere? Politics on social media. *Sociological Quarterly*, 59(1). <https://doi.org/10.1080/00380253.2017.1383143>
- Kurniawan, H. (2022). *Komnas HAM: Pembunuhan Brigadir J Bukan Pelanggaran HAM Berat*.
- Li, M., Turki, N., Izaguirre, C. R., DeMahy, C., Thibodeaux, B. L., & Gage, T. (2021). Twitter as a tool for social movement: An analysis of feminist activism on social media communities. *Journal of Community Psychology*, 49(3). <https://doi.org/10.1002/jcop.22324>
- Manokha, I. (2009). Foucault's concept of power and the global discourse of human rights. *Global Society*, 23(4). <https://doi.org/10.1080/13600820903198792>
- Miichi, K. (2020). Post-Islamism Revisited: The Response of Indonesia's Prosperous Justice Party (PKS) to Gender-Related Issues. *Muslim World*, 110(4). <https://doi.org/10.1111/muwo.12367>
- Mills, K. A. (2018). What are the threats and potentials of big data for qualitative research? *Qualitative Research*, 18(6). <https://doi.org/10.1177/1468794117743465>
- Motion, J. (2005). Participative public relations: Power to the people or legitimacy for government discourse? *Public Relations Review*, 31(4). <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2005.08.009>
- Noer, K. U., Chadijah, S., & Rudiatin, E. (2021). There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia. *Heliyon*, 7(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08552>
- Pittman, M., & Abell, A. (2021). More Trust in Fewer Followers: Diverging Effects of Popularity Metrics and Green Orientation Social Media Influencers. *Journal of Interactive Marketing*, 56. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2021.05.002>
- Poell, T. (2019). Social media, temporality, and the legitimacy of protest. *Social Movement Studies*. <https://doi.org/10.1080/14742837.2019.1605287>
- Prasetia, F. A. (2022). *Langkah Polri Tak Tahan Putri Candrawathi Sesuai Rekomendasi Komnas Perempuan*.

- Riabov, O. (2020). The Symbol of the Motherland in the Legitimation and Delegitimation of Power in Contemporary Russia. *Nationalities Papers*, 48(4). <https://doi.org/10.1017/nps.2019.14>
- Rivers, D. J., & Ross, A. S. (2020). Authority (de)legitimation in the border wall Twitter discourse of President Trump. *Journal of Language and Politics*, 19(5). <https://doi.org/10.1075/jlp.19105.riv>
- Ron, J., Pandya, A., & Crow, D. (2016). Universal values, foreign money: funding local human rights organizations in the global south. *Review of International Political Economy*, 23(1). <https://doi.org/10.1080/09692290.2015.1095780>
- Sadat, A., & Ilham, R. F. (2022). *Mahfud MD Sebut Komnas HAM Masih Terjebak Dalam Skenario Sambo*.
- Singh, N. K., Tomar, D. S., & Sangaiah, A. K. (2020). Sentiment analysis: a review and comparative analysis over social media. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 11(1). <https://doi.org/10.1007/s12652-018-0862-8>
- St-Onge, C., Young, M., Eva, K. W., & Hodges, B. (2017). Validity: one word with a plurality of meanings. *Advances in Health Sciences Education*, 22(4). <https://doi.org/10.1007/s10459-016-9716-3>
- Sunderland, J. (2020). Gender, language and prejudice: Implicit sexism in the discourse of Boris Johnson. *Open Linguistics*, 6(1). <https://doi.org/10.1515/opli-2020-0022>
- Syamili, C., & Rekha, R. V. (2021). Twitter and social movement: An analysis of tweets in response to the #metoo challenge. *International Journal of Media and Information Literacy*, 6(1). <https://doi.org/10.13187/IJMIL.2021.1.231>
- Tiidenberg, K., & Whelan, A. (2019). "Not like that, not for that, not by them": social media affordances of critique. *Communication and Critical/Cultural Studies*, 16(2). <https://doi.org/10.1080/14791420.2019.1624797>
- Vaara, E. (2014). Struggles over legitimacy in the Eurozone crisis: Discursive legitimation strategies and their ideological underpinnings. *Discourse and Society*, 25(4). <https://doi.org/10.1177/0957926514536962>
- Van Leeuwen, T. (2007). Legitimation in discourse and communication. *Discourse & Communication*, 1(1). <https://doi.org/10.1177/1750481307071986>
- Velasco, J. C. (2021). You are cancelled: Virtual collective consciousness and the emergence of cancel culture as ideological purging. *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 12(5). <https://doi.org/10.21659/RUPKATHA.V12N5.RIOC1S21N2>
- Yağcıoğlu, S., & Cem-Değer, A. (2001). Logos or mythos: (de)legitimation strategies in confrontational discourses of sociocultural ethos. *Discourse and Society*, 12(6). <https://doi.org/10.1177/0957926501012006005>
- Ye, Y., Xu, P., & Zhang, M. (2017). Social media, public discourse and civic engagement in modern China. *Telematics and Informatics*, 34(3). <https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.05.021>
- Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications Design and Methods Sixth Edition. In *Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.* Sage Publication, Inc.
- Yu, Y. (2022). Perpetuating and/or resisting the "leftover" myth? The use of (de)legitimation strategies in the Chinese English-language news media. *Feminist Media Studies*, 22(3). <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1837909>

*Nur Imroatus Sholikhah*

*Delegitimasi Wacana Kekerasan Seksual Komnas Perempuan di Media Sosial oleh Warganet pada Kasus Ferdy Sambo*

---